

KUNJUNGAN KOMISARIS TINGGI HAM - PBB KE INDONESIA

Oleh: Kombes Pol. Drs. Runadi Ma'mun

KTHAM (Komisaris Tinggi HAM) PBB, Ms. Louise Arbour (berkebangsaan Kanada) berkunjung ke Indonesia pada tanggal 10 - 14 Juli 2007. Kunjungan KTHAM ke Indonesia merupakan kunjungannya yang pertama kali dalam rangka menghadiri serta membuka secara resmi Lokakarya ke-14 mengenai Pemajuan dan Perlindungan HAM di Kawasan Asia Pasifik (Bali), 10 - 12 Juli 2007, serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI dan melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi Indonesia.

Ms. Louise Arbour merupakan KTHAM ke-5 yang memulai tugasnya sejak bulan Juli 2004 menggantikan KTHAM Sergio Viera de Mello (2002-2003), yang tewas akibat pemboman di Irak pada tahun 2003.

Jabatan Komisaris Tinggi HAM PBB (disingkat KTHAM dan dalam bahasa Inggris disebut High Commissioner for Human Rights) dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB yang disahkan pada bulan Desember 1993. Berdasarkan resolusi yang disahkan sejalan dengan prinsip-prinsip Deklarasi dan Program Aksi HAM Wina, KTHAM adalah pejabat tertinggi juru bicara dunia/PBB untuk isu-isu pemajuan dan perlindungan HAM sedunia. Jabatan KTHAM merupakan jabatan setingkat wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB. KTHAM mengesal Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa.

Dalam rangka kunjungan ke Indonesia, KTHAM melakukan pertemuan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI serta sejumlah Pejabat Tinggi Kabinet Bersatu, antara lain Menlu, Menko Polhukam, Menhumkam, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. KTHAM juga memanfaatkan pertemuan untuk berkunjung ke Propinsi NAD dalam rangka melakukan dialog dengan Muspida NAD.

Satu hal yang dapat digarisbawahi adalah kunjungan KTHAM ke Indonesia, termasuk NAD bukanlah kunjungan untuk mencari fakta namun merupakan kunjungan resmi yang bersifat persahabatan. Meski

demikian, mengingat bahwa KTHAM adalah pejabat tinggi dunia (PBB) yang memiliki tugas utama memajukan upaya-upaya pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, maka dapat diantisipasi bahwa kunjungan dan pertemuannya dengan berbagai pejabat tinggi di Jakarta dan Propinsi NAD, Ms. Arbour juga akan difokuskan pada berbagai permasalahan seputar isu-isu HAM, termasuk penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lampau.

Sejalan dengan salah satu mandat KTHAM yaitu pengembangan upaya-upaya pemantauan dan perangkat hukum yang terkait dengan transitional justice (KKR), KTHAM menaruh perhatian khusus pada pemberdayaan peran dan fungsi Komnas HAM, termasuk perwakilannya di daerah.

Pertemuan dengan KTHAM dapat dimanfaatkan oleh pejabat Pemerintah sebagai momentum yang tepat untuk menyampaikan peran konstruktif Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, menghormati HAM dan rule of law, termasuk perkembangan terkini pasca Kesepakatan Damai di NAD. Kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk semakin mendekatkan berbagai isu-isu HAM kepada berbagai konstituen domestik di daerah.

Adapun tujuan kedatangan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Indonesia sebagai berikut :

- Indonesia berpengaruh di Zona Asean.
 - Indonesia tiga tahun kedepan dipilih sebagai delegasi HAM PBB.
 - Pelaku-pelaku yang berkepentingan dan berkaitan dengan perlindungan HAM.
 - Ingin mendapatkan informasi dari Polri tentang pelaksanaan HAM di Indonesia.
 - Keterkaitan Polri dan Komnas HAM, criteria pelanggar HAM dan penanganannya.
- Wakapolri dalam menerima kunjungan KTHAM PBB menjelaskan beberapa hal antara lain :
- Sebelum tahun 2002 Polri masuk Dep. Hankam.

- Era reformasi dan UU No. 2 tahun 2002 Polri terpisah dan berada dibawah Presiden RI.
- Program reformasi Polri meliputi program instrument, organisasi dan kultur.
- Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh Badan Internasional HAM.
- Pendidikan Bintara, Perwiran dan Tinggi di Kepolisian sudah diberikan pelatihan tentang HAM.
- Di daerah konflik Polri didampingi oleh Badan Internasional HAM.
- HAM telah dicantumkan dalam falsafah, Kode Etik Kepolisian dan UU Kepolisian Negara RI.
- Rumah Tahanan Polri berjumlah kurang lebih 6.000 pada tahun 2009 akan dibangun/rehabilitasi menurut standar HAM.

Tanya jawab Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Wakapolri sebagai berikut :

Pengaduan masyarakat tentang HAM siapa yang menindak lanjut?

Penanganan pengaduan kasus HAM dapat diterima oleh Komnas HAM atau Kepolisian selanjutnya diajukan kepada pengadilan HAM.

Bagaimana perkembangan penanganan HAM (Kasus Munir)?

Penanganan awal kasus Munir bukan oleh Polri, namun Polri sudah dapat memproses sampai ke Pengadilan, Polri mempunyai keyakinan Polycarpus adalah pelaku, Polri dan Kejaksaan sedang berusaha untuk mencari novum sebagai bukti baru untuk pengajuan PK, saat ini Polri sedang melakukan penyidikan kepada tersangka yang ada kaitannya dengan kasus Munir.

Bagaimana penanganan tahanan dan perlindungan saksi?

Perundang-undangan tentang perlindungan saksi sudah disahkan, sedangkan perlindungan diberikan kepada saksi kunci dan keluarga korban pelanggar HAM dan dilakukan oleh Polri.***

PENANGANAN KASUS PEOPLE SMUGGLING

Kasus people smuggling dengan tersangka utama SITHAMPIRAPILAI SANTHIRA BABU dan kawan-kawan kembali terjadi, dan proses pengungkapan kasus ini ternyata meliputi poros Jakarta-Australia, yang melewati Tangerang, Cisarua, Lampung, Banten, Makassar, sampai keluar negeri yaitu Perth dan Nauru.

Rangkaian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan tersebut merupakan kegiatan bersama yang melibatkan personil Baintelkam Polri dan Bareskrim Polri dan sekaligus merupakan operasi bersama dengan AFP (Australian Federal Police).

Tindak Pidana yang telah disangkakan adalah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu

asli dan tidak dipalsukan. Hal mana sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menjelaskan tentang "tindak pidana pencurian dan atau penipuan, menyimpan, menggunakan barang yang diduga dari hasil kejahatan". Begitu juga di dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 huruf

(b) UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: "Dalam hal mempergunakan sesuatu yang dapat mendatangkan suatu kerugian dan atau orang asing yang berada di Wilayah RI secara tidak sah dan atau orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada di Wilayah RI melampaui 60 hari dari batas waktu yang diberikan dan atau menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah RI secara tidak sah".

Sukses Operasi penangkapan yang dilakukan adalah berkat kerjasama personil Unit III/Trafficking dan Sila Direktorat I/Kam dan Trans Bareskrim Polri serta Anggota Den "D" Baintelkam Polri.

Adapun hasil penangkapan di Bintaro Jakarta Selatan pada tanggal 7 Mei 2007 menangkap WNA Srilangka SITHAMPIRAPILAI SANTHIRA BABU alias BABU dan IYATURAI MOHAN alias MOHAN. Sedangkan penangkapan di Kemanggisan Jakarta Barat pada tanggal 10 juni 2007

menangkap satu orang anggota sindikat ABRAHAM LOUHANAPESSEY alias BRAM. Beberapa temuan yang disita sebagai barang bukti kejahatan adalah 79 buah tiket pesawat maskapai penerbangan asing, yang ditemukan di TKP Kemanggisan (bekas tempat penampungan WN Srilangka yang akan diselundupkan. Selain itu ditemukan juga uang tunai rupiah sejumlah Rp. 420.716.000.000,- dan uang tunai US\$ 4300 serta mata uang asing lainnya seperti Rupee, Ringgit Malaysia, Dolar Singapura serta mesin hitung dan kalkulator serta 248 buah Kartu Kredit / ATM dari 17 jenis.

Keberhasilan Polri mengungkap kasus perdagangan manusia di Srilangka ke Australia yang dikendalikan dari

Jakarta, maka Kepolisian Federal Australia (AFP) menyerahkan penghargaan kepada Polri. Piagam Penghargaan itu diserahkan oleh Deputy Comissioner AFP, John Lawker kepada Wakapolri Komjen Pol. Drs. Makbul Padmanegara digedung TNCC Mabes Polri.

AFP memberikan penghargaan kepada

Polri karena berhasil menangkap tiga tersangka WN Sri Langka yang kini telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum adalah Babu, Mohan dan Bram padahal mereka sudah beraksi selama sembilan tahun. Polri dalam mengungkap kasus perdagangan manusia banyak bertukar informasi dengan AFP, dimana kasus ini bermula dari Australia ketika menangkap satu kapal berisi 83 manusia untuk diselundupkan ke Australia. Para tersangka selain memperdagangkan manusia, juga melakukan pembobolan Kartu Kredit hingga ratusan kali, membuat dokumen palsu dan melanggar keimigrasian.

Wakapolri dalam acara menerima penghargaan dari AFP menyatakan "**pemberantasan kejahatan perdagangan manusia membutuhkan kerjasama Kepolisian beberapa Negara**" termasuk AFP dan Polri. "Kerjasama dengan Australia tidak hanya soal perdagangan manusia, tetapi berbagai kasus seperti Narkoba, kejahatan ekonomi dan terorisme".

Selamat atas keberhasilan Polri dan tetap dalam kebersamaan dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan dimuka bumi ini.***

